



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021 - 57902925

NOTA DINAS

Nomor: ND.80/SETPHLHK/PEHKT/KST.3.1/B/02/2024

Kepada Yth : Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak lanjut Rakornis Gakkum LHK TA 2024
Tanggal : 12 Februari 2024

Menindaklanjuti arahan Bapak pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Gakkum LHK Tahun 2024 di Bandung Pada Tanggal 1-2 Februari 2024, bersama ini dengan hormat dilaporkan hasil identifikasi *interlinkage* kegiatan antar Unit Kerja Eselon II Ditjen Gakkum LHK dan Balai Gakkum LHK sesuai hasil Rakornis dimaksud. Untuk itu, terkait dengan *interlinkage* kegiatan tersebut akan diintensifkan komunikasi dan koordinasi antar Unit Kerja Eselon II dan Balai Gakkum LHK melalui forum rapat-rapat baik secara formal maupun informal (*Coffee Morning*).

Demikian, mohon arahan Bapak lebih lanjut.



Dwi Januanto Nugroho
NIP 197601082003121005

RUMUSAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024
Bandung, 1 - 2 Februari 2024

ARAHAN STRATEGIK

1. Implementasi rencana kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 harus berfokus pada pencapaian level *outcome*.
2. Penurunan gangguan lingkungan hidup dan kehutanan dan kawasan hutan berikut keanekaragaman hayati harus menjamin ketersediaan sumberdaya produktif unruk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya penegakan hukum diarahkan untuk pengembalian kerugian dan peningkatan pendapatan negara, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan KLHK cq. Ditjen Gakkum LHK.
3. Dalam rangka pencapaian outcome, dipandang perlu untuk koordinasi teknis kegiatan yang bersifat *interlinkage* antar unit kerja Eselon II pada Ditjen Gakkum LHK, dan koordinasi teknis maupun komunikasi vertikal dengan UPT Balai Gakkum LHK dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan penanganan perkara melalui penggunaan instrumen hukum yang tersedia.

INTERLINKAGE KEGIATAN

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
I	Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan LHK	1 Perlu dilakukan Penguatan Intelijen dalam dukungan-dukungan perlindungan hutan termasuk pengoptimalan personil yang telah selesai Diklat Intelijen serta pemanfaatan teknologi <i>Intelligence Center</i> , terutama dalam <i>desain</i> kasus-kasus operasi pengamanan hutan, sehingga keberhasilannya dapat meningkat	√		√			√

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		2 Perlu penyusunan konsep, rencana kegiatan serta anggaran dalam Pengamanan Teritorial yang menjadi poin penting dalam pencegahan terhadap gangguan keamanan kawasan hutan			√			√
		3 Perlu penyusunan rancangan Permen Polhut Satu Kesatuan Komando dalam tahun 2024 ini sebagai landasan kerja-kerja inovatif yang kolaboratif antar semua Polhut di Indonesia	√		√			√
		4 Perlu dilakukan peremajaan sarana dan prasarana pengamanan Kawasan hutan seperti kendaraan patroli dan SENPI	√		√			√
		5 Perlu dilakukan pengelolaan dan penyelesaian barang bukti hasil operasi yang masih mangkrak di beberapa tempat termasuk di kantor-kantor Balai Gakkum LHK.			√		√	√
		6 Perlu dilakukan pengelolaan dan penyelesaian barang bukti hasil operasi yang masih mangkrak di beberapa tempat termasuk di kantor-kantor Balai Gakkum LHK			√		√	√
		7 Perlu segera dilakukan pembentukan SPORC dalam tahun 2024 sebagai langkah regenerasi anggota yang telah melewati masa kerja produktif	√		√			

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		8 Fokus penanganan kasus tindak pidana kehutanan pada tipologi PETI dan perdagangan TSL illegal yang memiliki skala lebih luas serta memiliki dampak terhadap masyarakat			√		√	√
		9 Perlu dilanjutkan pembahasan terkait Draft Rancangan Permen LHK tentang Perlindungan Hutan sebagaimana amanat Pasal 265 PP 23/2021.	√		√			
		10 Perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terkait Rancangan Permen LHK tentang Pengawas Kehutanan sebagaimana amanat Pasal 272 PP 23/2021.	√		√			
II	Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1. Memastikan denda administrasi LHK dapat diterapkan pada tahun 2024.	√	√				
		2. Percepatan perumusan Rapermen LHK terkait penyelenggaraan pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	√	√				
		3. Memastikan SOP Pengaduan dan Pengawasan serta kriteria pelimpahan terbangun dan tersosialisasikan ke Balai dan Pemerintah Daerah		√				√

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		4 Memastikan Sanksi Administrasi mempunyai efek jera dengan melimpahkan ke pidana dan pemberatan melalui pencabutan izin		√			√	
		5 Melakukan evaluasi dan pelaporan bulanan penanganan pengaduan dan pengawasan dari Balai dan tindak lanjut pelimpahan	√	√				√
		6 Memastikan seluruh provinsi dan kabupaten/kota memiliki PPLH untuk mengawasi perizinan yang dikeluarkan daerah. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.		√				
		7 Meningkatkan kualitas PPLH baik nasional maupun daerah sehingga memiliki standard pengawasan yang sama	√	√				
		8 Mensosialisasikan 9 SOP Pengawasan spesifik kegiatan yang sudah ada, menambah 5 SOP spesifik kegiatan di tahun 2024.		√				√
III	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1 Optimalisasi eksekusi dan ganti rugi lingkungan hidup untuk peningkatan PNBP	√			√		
		2 Penyelesaian Rapermen terkait dana pemulihan sebagai payung hukum	√			√		

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		penempatan dana pemulihan LH melalui BPD LH.						
		3 Perlunya inisiasi Pengelola PNB secara terpusat di lingkup Ditjen Gakkum dalam mendorong peningkatan PNB untuk mendukung pencapaian target kinerja.	√			√	√	
		4 Optimalisasi pertukaran dan/atau penggunaan sumber data lingkup Eselon II secara bersama di Ditjen Gakkum dalam upaya penegakan hukum secara terintegrasi khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.	√			√		
		5 Perumusan mekanisme badan usaha yang "mengajukan pailit" untuk menghindari kewajiban bayar PNB (melanjutkan pelaksanaan P21 dan perdata)	√			√		
		6 Optimalisasi penggunaan instrumen penegakan hukum PSLH di wilayah (Balai Gakum).				√		√
IV	Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK	1. Pembahasan pengelolaan dan penyelesaian barang bukti temuan dan barang bukti sitaan yang belum terselesaikan di beberapa tempat termasuk di kantor-kantor Balai Gakkum LHK. Kedepannya akan			√		√	√

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		dibentuk Tim Satgas Penanganan Barang Bukti baik di Pusat maupun Balai.						
		2. Melakukan pencarian dan penyelesaian DPO dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> membentuk Tim Satgas Penanganan DPO (Dit PHP, Dit PPH, Setditjen, Balai Gakkum) melibatkan Tim Intelijen Gakkum di bawah koordinasi Dit. PPH. 	√				√	√
		3. Penentuan target penyelesaian PP24 dan proyeksi PNPB tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah subjek hukum yang tercantum dalam SK Datin dengan anggaran yang dimiliki.					√	
		4. Membangun aplikasi dengan melibatkan pihak ketiga guna mempercepat proses identifikasi bukaan lahan sehingga mempercepat proses kerja penyelesaian kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan.			√		v	
		5. Kolaborasi secara internal dengan PPNS di unit kerja lain dan asisten PPNS untuk mengatasi keterbatasan jumlah PPNS guna mempercepat penanganan perkara.					√	√
		6 Memperkuat case building dengan berfokus kepada kasus yang					√	√

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		mempunyai outcome dan impact . Kriteria kasus dengan melibatkan berbagai aktor dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas output sekaligus memberikan impact yang besar ke masyarakat.						
		7 Penambahan jumlah PPNS disesuaikan dengan anggaran dan target penyidikan di renstra sehingga dapat dibandingkan apakah perlu penambahan PPNS atau kegiatan peningkatan kapasitas tertentu yang dibutuhkan.	√				√	
		8 Mengembangkan penanganan kasus TPPU dengan fokus pada penelusuran dan penyitaan aset.					√	
		9 Mengembangkan penanganan perkara berorientasi restorasi dengan menghitung potensi kerugian lingkungan hidup dan lingkungan hutan serta potensi biaya pemulihan dari tindak pidana LHK dengan melibatkan ahli.				√	√	
V	Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Gakkum LHK	1. Pembentukan tim pengelola PNBPN bidang penegakan hukum LHK untuk memastikan terkelolanya PNBPN serta memastikan terbayarnya PNBPN oleh objek wajib bayar. • Penyusunan naskah terkait penindakan atas wajib bayar yang	√			√	√	

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		belum bayar/mangkrak sampai dengan saat ini dari Ditjen PHLHK ke Satlakwasdal UUCK Bidang LHK						
		<p>2. Pengawasan secara intens atas kebutuhan SDM di seluruh unit kerja lingkup Ditjen Gakkum:</p> <p>a. Pengadaan CPNS 2024 dan 2025 terhadap JF Polhut dan PPLH untuk di- follow up kembali.</p> <p>b. Perumusan pembentukan JF PPNS dan Pengawas Kehutanan bekerja sama dengan KL terkait</p> <p>c. Pembentukan SPORC yang berasal dari JF Polhut angkatan muda (untuk mengisi regenerasi)</p> <p>d. Perumusan kebijakan terkait JF Polisi Kehutanan dan JF PLH (tindak lanjut terbitnya Permen PANRB Nomor 1/2023).</p>	√					
		3. Revitalisasi Col untuk menguatkan dukungan penelusuran aset, analisis citra satelit kawasan terbangun di kawasan hutan, integrasi sistem untuk penguatan database Gakkum big data	√		√			
		4. Percepatan pembangunan ruangan court mock up untuk persiapan	√					

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		persidangan, gugatan, maupun kegiatan lainnya untuk latihan beracara.						
		5. Peremajaan mobil-mobil operasional maupun aset operasional lainnya di Balai dengan memanfaatkan top up PNBP; termasuk di dalamnya perlu adanya perbaikan data inventarisasi BMN dan aset di seluruh unit kerja	√					
		6. Penetapan logo Gakkum LHK ataupun atribut Gakkum LHK lainnya dalam sebuah produk hukum sehingga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan jajaran Ditjen Gakkum LHK	√					
		7. Peningkatan kualitas SDM melalui berbagai instrumen pengembangan kompetensi pegawai, baik kepada aparat penegak hukum (APH) maupun non APH (semua pegawai harus mendapatkan pengembangan kompetensi) sebagai bagian dari investasi SDM	√	√	√	√	√	√

KEGIATAN		REKOMENDASI/ LANGKAH TINDAK LANJUT	Penanggung Jawab Kegiatan					
			Setdit	Dit PPSA	Dit PPLHK	Dit PSLH	Dit PHP	Balai
		8. Optimalisasi implementasi keterkaitan (<i>interlinkage</i>) antara seluruh unit kerja organisasi lingkup Ditjen Gakkum dan pembangunan budaya kerja kolaboratif (tidak silo)	√	√	√	√	√	√
		9. Percepatan pembangunan KHDTK Sentul	√		√			
		10. Optimalisasi dan penguatan kapasitas humas Ditjen Gakkum dalam rangka penguatan public awareness	√					
		11. Penyusunan NSPK penanganan perkara praperadilan	√			√	√	
		12. Eksaminasi Putusan Pengadilan	√			√	√	